

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) Tahun 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI GEDUNG D LANTAI 2
JL WOLTER MONGINSIDI TENGGARONG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmad dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 21 Februari 2025





DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum..... | 2 |
| 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| 1.4. Permasalahan dan Isu Strategis..... | 3 |
| 1.5. Uraian Singkat Organisasi..... | 3 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 5 |
| 2.1. Perencanaan Strategis..... | 5 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja..... | 10 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 17 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... | 17 |
| 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024..... | 40 |
| BAB IV PENUTUP..... | 47 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 47 |
| 4.2. Perbaikan Kedepan..... | 52 |

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran..... | 7 |
| Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026..... | 8 |
| Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan..... | 9 |
| Tabel 2.4 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024 | 10 |
| Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 11 |
| Tabel 2.6. Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 dan tahun 2023 | 16 |
| Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... | 18 |
| Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024..... | 19 |
| Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja dua Tahun Sebelumnya..... | 34 |
| Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis. | 35 |
| Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 37 |
| Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis | 40 |
| Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024. ,..... | 41 |
| Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023..... | 33 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.



Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan
4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Ketahanan Pangan
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati



1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan menemukan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Ketahanan Pangan Daerah belum optimal
2. Skor Pola Pangan Harapan Masih Belum Ideal

Permasalahan tersebut didukung dengan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Infrastruktur pendukung ketahanan pangan masih belum memadai
2. Keamanan dan mutu pangan segar kualitasnya masih belum memadai
3. Masih terdapat daerah yang terindikasi rawan pangan
4. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat belum ideal
5. Kualitas dan kuantitas pangan masyarakat belum beragam bergizi, seimbang dan aman

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Perbub No 28 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Tata Laksana
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan



- 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Keamanan pangan, membawahkan :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Bagan Struksur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2021 sebagai berikut :



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum
Purhomo, SH., MH
Nip. 19780605 20021 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang di dalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021. Sebelumnya, yang telah dilakukan koordinasi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan dalam penyusunannya.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi yang termuat dalam RPJMD 2021 - 2026 adalah : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;



4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir *Cascade* RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2022.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Ditinjau dari sisi tugas perumusan dan kebijakan ketahanan pangan, secara umum tugas Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke – 2 yaitu “**Misi ke-2** (kedua), yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya** dengan tujuan Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat serta sasaran meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026. Berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2021-2026 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Adapun Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dinas ketahanan pangan;



2. Meningkatnya ketersediaan pangan daerah;
3. Meningkatnya skor pola pangan harapan;

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

| Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|---|
| Misi yang Relevan | Tujuan | | Sasaran | |
| | Uraian | Indikator Kinerja | Uraian | Indikator Kinerja |
| Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya; | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) | Meningkatnya Ketersedian Pangan Daerah | Ketersediaan Energi Ketersediaan Protein |
| | | Skore Pola Pangan Harapan | Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH) Konsumsi |



Tabel 2.2 Tujuan dan sasaran dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR / SASARAN TUJUAN | SATUAN | KONDISI AWAL PERIODE 2021 | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD |
|----|--|--|---|---|---------------------------|--|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 76,01 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| 2 | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | | Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) | % | 128,72 | 129,00 | 130,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | Skore Pola pangan harapan Ketersediaan | Skore | 96,48 | 96,48 | 97,89 | 98,59 | 99,30 | 100,00 | 100,00 |
| | | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | | | | | | | | |
| | | | - Ketersediaan Energi | kkal/kapita/hari | 2365 | 2372 | 2379 | 2386 | 2393 | 2400 | 2400 |
| | | | - Ketersediaan Protein | gr/kapita/hari | 79,04 | 79,42 | 79,81 | 80,20 | 80,58 | 80,97 | 80,97 |
| | | | Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (skor PPH) Konsumsi | Skor | 81,30 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 | 90,00 |



2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai kartanegara untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras)
3. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan
4. Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asak Tumbuhan.
5. Pemenuhan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

| | | | |
|--|---|---|--|
| VISI (RPJMD) | : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia" | | |
| MISI (RPJMD)* | : "Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berb" | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Berdaya Guna bagi Masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan |
| Meningkatkan Ketahanan pangan Daerah | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah | Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras) | Meningkatkan Infrastruktur Kemandirian Pangan Untuk Mendukung Ketersediaan Pangan Utama |
| | | Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan | Menurunkan Jumlah Daerah Yang Terindikasi Rentan Rawan Pangan |
| | | Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar | Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan |
| | Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Pemenuhan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman | Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan |



2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran Strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program |
|---|---|---|
| Percepatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras) | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan) | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan |
| Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan pangan | Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I | Program Penanganan Kerawanan Pangan |
| Penguatan Keamanan dan Mutu Pangan Segar | Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi (Persen) | Program Pengawasan Keamanan Pangan |
| Pemenuhan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat |

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|----|---|--|---------------|--------|---|
| 1 | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 79 | Total Skore Hasil penilaian Dari Tim Inspektorat Kabupaten |
| 2 | Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah | Ketersediaan Energi | Kkal/kap/hari | 2387 | Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) merupakan jumlah energi yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk; Diambil dari perhitungan Neraca Bahan Makanan |
| | | Ketersediaan Protein | Gram/kap/hari | 80,20 | Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) merupakan jumlah energi yang tersedia untuk konsumsi pangan per kapita penduduk; Diambil dari perhitungan Neraca Bahan Makanan |
| 3 | Meningkatnya Skore Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore PPH) Konsumsi. | Skore | 86 | Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain |
| 4 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | Dilihat dari Hasil laporan LHKPN pada Aplikasi |
| | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100 Persen per tanggal 31 Maret Setia tahun | Persen | 100 | Dilihat dari Data Pelaporan SPT Tahunan pada Rekapitulasi Dinas Ketahanan Pangan |
| 5 | Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir Nulan Pebruari Setiap Tahun | Persen | 100 | Data Laporan SKP Pada Aplikasi E Kinerja |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|----|---|--|--------|--------|---|
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap Tahun | Persen | 100 | Data Laporan SIRUP dari OPD Pengampu |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Input E Pantau | Tingkat Ketepatan waktu Input E Pantau san telah di Verifikasi 100% per tanggal 10 Setiap Bulan | Persen | 100 | Hasil laporan dari E Pantau Perangkat Daerah |
| 8 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 | Laporan Usulan RKBMD Yang disampaikan kepada Bidang Aset |
| 9 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Usulan Standar harga Satuan (SHS) Perangkat daerah Paling Lambat Bulan April Untuk Tahun Anggaran Berikutnya | Persen | 100 | Laporan hasil Penyampaian Usulan SHS pada Aplikasi Simaston |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Intstansi Pemerintahan (LKJIP) Perangkat Daerah Paling Lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun | Persen | 100 | Penyampaian Laporan LKJIP pada Aplikasi SAKIP Kabupaten |
| 11 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan januari setiap tahun. | Persen | 100 | Penyampaian Laporan IKK pada Aplikasi Bapadah |
| 12 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 | Bukti Penyampaian Laporan LK SKPD ke BPKAD |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|----|---|---|--------|--------|--|
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak lanjut Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak lanjut) RTL Semester I paling lambat akhir Bulan Juni dan semester II akhir Bulan Oktober setiap tahun | Persen | 100 | Laporan Penyampaian SKM dari Perangkat daerah |
| 14 | Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 | Laporan Hasil Forum Perangkat Daerah |
| 15 | Menyelesaikan Tindak Lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas Audit LKPD 5 tahun terakhir | Persen | 100 | Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan Jumlah Rekomendasi BPK yang di terima |
| 16 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah Per 30 Juni Tahun Berikutnya | Persen | 100 | Bukti Penyampaian Laporan SPIP |
| 17 | Penerapan Core Value Berakhlak | Internalisasi Core Value Berakhlak | Persen | 100 | Penerapan Core Value Berakhlak pada SKPD |
| 18 | Penyusunan Perjanjian Kinerja Sampai Ke Pelaksana | Ketepatan waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 | Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan ke Bagian Organisasi |
| 19 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 100 | Laporan Serapan anggaran dari BPKAD |
| 20 | Ketersediaan Dokumen manajemen Resiko Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko Pada Perangkat daerah Per Tri Wulan | Persen | 100 | Dokumen Manajemen Resiko yang diampaikan kepada Inspektorat |
| 21 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | Laporan Manajemen Resiko yang disusun |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|----|--|---|--------|--------|--|
| 22 | Melaksanakan tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Persen | 100 | Niai Penataan Arsip Perangkat daerah |
| 23 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Persen | 100 | Nilai Sakip Perangkat Daerah |
| 24 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | Keikutsertaan dalam Pekan Inovasi Daerah |
| 25 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Persen | 100 | Laporan Tindak Lanjut |
| 26 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset tanah | Persen | 100 | Laporan Pengamanan Aset Tanah |
| 27 | Meningkaynya Tata Kelola Aset | Fakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksanan pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | Fakta Integritas Pemakai Aset BMD yang diserahkan ke Bidang Aset BPKAD |
| 28 | Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan Pada Perangkat Daerah | Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan | Persen | 100 | Program Penanguulangan Kemiskinan dalam RBPK |
| 29 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi stunting sesuai Dengan Target Nasional | Persen | 14 | Laporan Hasil Penanggulangan Stunting |
| 30 | Pengarus Utamaan Gender | Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender | Persen | 100 | Dokumen Penganggaran Pengarusutamaan Gender yang telah disusun |
| 31 | Peningkatan Investasi | Capaian Investasi Kabupaten Kutai kartanegara | Rupiah | 7,3 T | Laporan Realisasi Investasi Pada Pemerintah Daerah |
| 32 | Pengendalian Inflasi | Angka Inflasi 1,5% - 3,5% | Persen | 100 | Data Inflasi pada Data Statistik kabupaten Kutai Kartanegara |
| 33 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap Bulan | Persen | 100 | Laporan Tingkat Keterisian Pelaporan P3DN |
| 34 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 | Nilai LPPD Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 35 | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 73 | Nilai Sakip Kabupaten Kutai Kartanegara |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Keterangan / Rumus Penghitungan |
|----|---|--|-----------------|------------|---|
| 36 | Meningkat manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah | Nilai | 64 | Laporan Indeks Reformasi Birokrasi |
| 37 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 | Nilai Indeks Inovasi Daerah |
| 38 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 | Nilai Indeks Pelayanan Publik |
| 39 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona Hijau | Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Pemerintah |
| 40 | Terlaksana Kawasan tanpa Rokok/Vape | Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 | Laporan Kawasan Tanpa Rokok |
| 41 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM Perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 100 | IKM Perangkat daerah |
| 42 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| 43 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Indikator Kinerja Perangkat daerah | Persen | 100 | Laporan IKK Perangkat Daerah |
| 44 | Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah | Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah | Laporan | 1 | Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah |
| 45 | Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat daerah | SK Pembentukan UPZ Perangkat daerah | Surat Keputusan | 1 | SK Pembentukan UPZ Perangkat daerah |



Tabel 2.6
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 dan tahun 2023

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Data Awal (2021) | Target Tahun 2022 | Target Tahun 2023 | Target Tahun 2024 | Target Akhir Renstra 2026 |
|-----|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | Nilai | 76,21 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| 2 | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 128,72 | 129 | 130 | 134 | 140 |
| 3 | Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Persen | 96,48 | 96,48 | 97,89 | 98,59 | 100 |
| 4 | Ketersediaan energi dan protein Perkapita | | | | | | |
| | - Ketersediaan Energi | Kkal/Kap/Hari | 2365 | 2372 | 2378 | 2387 | 2400 |
| | - Ketersediaan Protein | Gram/Kap/Hari | 79,04 | 79,42 | 79,81 | 80,20 | 80,97 |
| 5 | Konsumsi Energi dan Protein (Score PPH Konsumsi) | Score | 81,3 | 82 | 84 | 86 | 90 |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$



b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Interval Nilai | Kriteria Penilaian |
|----------------|--------------------|
| 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi |
| 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 66% ≤ 75% | Sedang |
| 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 50% | Sangat Rendah |

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 sebesar 101,41% Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|--|--|----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | Nilai | 79 | 66,94 | 84,73 | Tinggi |
| 2. | Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 134 | 102,95 | 76,83 | Tinggi |
| | | Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Persen | 98,59 | 94,12 | 95,67 | Tinggi |
| | | Ketersediaan energi dan protein Perkapita | | | | | |
| | | - Ketersediaan Energi | Kkal/Kap /Hari | 2387 | 2546 | 106,66 | Sangat Tinggi |
| | - | - Ketersediaan Protein | Gram/ Kap/Hari | 80,20 | 84,77 | 105,70 | Sangat tinggi |
| 3. | Meningkatnya Skore Pola Pangan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | Skore | 86 | 93,80 | 109,07 | Sangat Tinggi |
| 4 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100 Persen per tanggal 31 Maret Setia tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 5 | Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir Nulan Pebruari Setiap Tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap Tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Input E Pantau | Tingkat Ketepatan waktu Input E Pantau dan telah di Verifikasi 100% per tanggal 10 Setiap Bulan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-----------------|--------------------|
| 8 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 9 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Usulan Standar harga Satuan (SHS) Perangkat daerah Paling Lambat Bulan April Untuk Tahun Anggaran Berikutnya | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Intstansi Pemerintahan (LKJIP) Perangkat Daerah Paling Lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 11 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan januari setiap tahun. | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 12 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak lanjut Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir Bulan Juni dan semester II akhir Bulan Oktober setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|--|--|--------|--------|--------------|-----------------|--------------------|
| 14 | Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 15 | Menyelesaikan Tindak Lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas Audit LKPD 5 tahun terakhir | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 16 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah Per 30 Juni Tahun Berikutnya | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 17 | Penerapan Core Value Berakhlak | Internalisasi Core Value Berakhlak | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 18 | Penyusunan Perjanjian Kinerja Sampai Ke Pelaksana | Ketepatan waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 19 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 100 | 89,57 | 89,57 | Tinggi |
| 20 | Ketersediaan Dokumen manajemen Resiko Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko Pada Perangkat daerah Per Tri Wulan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 21 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 22 | Melaksanakan tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Persen | 100 | 66,41 (BAIK) | 66,41 | Sedang |
| 23 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Persen | 79 | 66,94 | 84.73 | Tinggi |
| 24 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 25 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 26 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset tanah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|---|---|----------|------------|------------|-----------------|--------------------|
| 27 | Meningkaynya Tata Kelola Aset | Fakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksanan pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 28 | Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan Pada Perangkat Daerah | Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan | Jumlah | 1 | 1 | 100 | Sangat tinggi |
| 29 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi stunting sesuai Dengan Target Nasional | Persen | 14 | 14 | 100 | Sangat tinggi |
| 30 | Pengarus Utamaan Gender | Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 31 | Peningkatan Investasi | Capaian Investasi Kabupaten Kutai kartanegara | Rupiah | 7,3 T | 14,8 T | 200 | Sangat tinggi |
| 32 | Pengendalian Inflasi | Angka Inflasi 1,5% - 3,5% | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 33 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap Bulan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 34 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 | 3,1135 | 86,49 | Tinggi |
| 35 | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 73 | 65,92 | 90,30 | Sangat Tinggi |
| 36 | Meningkat manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah | Nilai | 64 | 60,12 | 93,94 | Sangat Tinggi |
| 37 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 | 58,59 | 118,20 | Sangat Tinggi |
| 38 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 | 4,35 | | |
| 39 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona Hijau | Zona Hijau | 100 | Sangat Tinggi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|---|--|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------|
| 40 | Terlaksana Kawasan tanpa Rokok/Vape | Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 41 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM Perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 100 | 87,67 | 87,67 | Tinggi |
| 42 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 73,59 | 73,59 | Tinggi |
| 43 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Indikator Kinerja Perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 44 | Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah | Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 1 | 100 | Sangat tinggi |
| 45 | Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat daerah | SK Pembentukan UPZ Perangkat daerah | Surat Keputusan | 1 | 1 | 100 | Sangat tinggi |
| | | | | | | | |

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, 45 (Empat Puluh Lima) indikator Kinerja sasaran hampir semua memenuhi memenuhi target yang ditetapkan (tercapai $\geq 100\%$), tetapi masih terdapat 11 Indikator yang Capaiannya masih di bawah 100 tetapi masih termasuk dalam kategori Tinggi.

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel 3.1 diatas, dapat dijelaskan hasil capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan diukur dengan indikator sebanyak 45 Indikator, untuk masing masing indikator yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai



salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Insektorat sebesar 66,94 (dengan predikat B) sementara target yang ditetapkan sebesar 79,00 sehingga realisasinya capaian kinerja sebesar **84,73%** (Sumber Data *Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024*). Tidak tercapainya Target kinerja karena terdapat beberapa Indikator tambahan yang memang sulit untuk dipenuhi Oleh Perangkat Daerah.

2. Indikator Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah

Untuk mendukung Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah diukur dengan 4 (Empat) indikator sebagai berikut:

a. Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/Jagung sesuai kebutuhan)

Target kinerja Untuk Indikator ini pada tahun 2024 sebesar 134% dan realisasinya 102,95% atau capaian kinerja sebesar 76,83% (*sumber data Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Normatif Beras Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu peningkatan Produksi Beras lebih rendah dari peningkatan kebutuhan pangan. Solusi/rekomendasinya adalah perlu peningkatan produksi Padi sebagai sumber ketersediaan pangan utama dan penambahan pengadaan Cadangan Pangan.

b. Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan

Target kinerja untuk Indikator Score Pola Pangan Harapan Ketersediaan pada Tahun 2024 sebesar 98,59 dan realisasinya 94,12 atau capaian kinerja sebesar 95,67% (*sumber data Neraca Bahan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu peningkatan Produksi Beras lebih rendah dari peningkatan kebutuhan pangan. Serta tingkat keberagaman ketersediaan pangan yang kurang seimbang, masih kurangnya ketersediaan pangan dari sumber Umbi-umbian, Buah/Biji



berminyak dan sayuran dan Buah. Solusi/rekomendasinya adalah perlu peningkatan produksi sumber bahan pangan sesuai dengan keragamannya.

c. Ketersediaan energi dan protein Perkapita

1) Ketersediaan Energi

Target kinerja untuk Indikator Ketersediaan Energi pada tahun 2024 sebesar 2387 dan realisasinya 2546 atau capaian kinerja sebesar 106,66% (Sumber data *Neraca Bahan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026*). Target kinerja capaian melebihi target, hal ini didukung karena Ketersediaan Pangan yang cukup tersedia baik hasil produksi maupun dari masukan dari luar daerah, meskipun keanegaragamannya masih kurang.

2) Ketersediaan Protein

Target kinerja untuk Indikator Ketersediaan Protein tahun 2024 sebesar 80,20 dan realisasinya 84,77 atau capaian kinerja sebesar 105,70% (Sumber data *Neraca Bahan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target kinerja capaian melebihi target, hal ini didukung karena Ketersediaan Pangan sumber protein yang cukup berlimpah, cukup tersedia dan cukup beragam.

2. Meningkatnya Skore Pola Pangan

Meningkatnya score Pola Pangan harapan di ukur dengan Indikator Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi)

Target kinerja Indikator Kinerja ini tahun 2024 sebesar 86 dan realisasinya 93,80 atau capaian kinerja sebesar 109,07 % (*sumber data Direktori Konsumsi Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target kinerja capaian melebihi target karena membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat yang didukung oleh keanekaragaman pangan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman, yang didukung



oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sumber bahan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

3. Mewujudkan tingkat Kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) .

Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN per tanggal 31 Maret 2024. Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 mencapai 100%, dimana Informasi pengumuman harta kekayaan penyelenggaraan negara yang tercantum dalam situs e-LHKPN.

4. Tingkat Kepatuhan dalam Penyampaian SPT Tahunan. Sampai dengan Tanggal 31 Maret 2024 Seluruh ASN yang wajib menyampaikan SPT Tahunan Sudah menyampaikan semua.

5. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP Paling kambat akhir Bulan pebruari 2024. Seluruh ASN Dinas Ketahanan pangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sudah semua menyampaikan SKP tahunan. Bisa dilihat di Aplikasi E Kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Dari target 100 Persen tercapai 100%

06. Tingkat Kepatuhan Input serta Pengumuman paket pengadaan pada Aplikasi SIRUP. Sesuai dengan ketentuan bahwa pada akhir Pebruari 2024 harus sudah input data pada aplikasi SIRUP, Dinas Ketahanan Pangan sudah melaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ada. Dari target yang ditetapkan, capaian Kinerja 100%.

07. Tingkat Ketepatan Waktu Input E pantai dan Telah diverifikasi 100% setiap tanggal 10 setiap Bulan. Telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan selalu selesai sebelum tanggal 10 setiap Bulan yang diambil dari data real time di aplikasi E Pantau. Realisasi Capaian 100% dari target yang ditetapkan 100%

08. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan. Sebeluem Proses usulan anggaran untuk Pengadaan, Dsinas Ketahanan Pangan sudah



mengajukan usulan RKBMD ke Bidang Aset BPKAD.

09. Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Usulan Standar harga Satuan (SHS) Perangkat daerah Paling Lambat Bulan April Untuk Tahun Anggaran Berikutnya. Usulan SHS telah disampaikan melalui aplikasi Simaston. Dengan Capaian 100% dari target yang ditetapkan 100%.
10. Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Perangkat Daerah Paling Lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun. LKJIP telah diupload dalam E SAKIP Kukar dan SAKIP Reviu Menpan dengan Realisasi Capaian 100%
11. Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan januari setiap tahun. Penyampaian IKK LPPD Kepada Bagian tata Pemerintahan telah disampaikan tepat waktu dengan Capaian Kinerja 100%.
12. Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun. Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024 telah disusun disampaikan ke BPKAD pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Capaian Kinerja 100%.
13. Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir Bulan Juni dan semester II akhir Bulan Oktober setiap tahun dengan capaian 100%.
14. Menilai Pelaksanaan Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
15. Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas Audit LKPD 5 tahun terakhir.

Menyelesaikan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Daerah. Temuan BPK yang diperbaiki. Untuk rekomendasi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Lima Tahun terakhir oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur semua sudah diklarifikasi dan tidak terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti baik secara administratif maupun material. Hal ini ditunjukkan dengan **tidak**



adanya surat konfirmasi dari Tim BPK setelah dilakukan audit pada saat pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.

16. Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah Per 30 Juni Tahun Berikutnya. Laporan Penyelenggaraan SPIP telah disusun dan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui link yang telah diberikan.

17. Internalisasi Core Value Berakhlak

Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN “BERAKHLAK”

Kinerja indikator jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja oleh Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2024, dengan capaian kinerja indikator jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja oleh Dinas Ketahanan Pangan sebesar 100%. Faktor keberhasilan dari capaian kinerja indikator jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah tersedianya kebijakan kepala daerah terhadap Implementasi ASN BERAKHLAK, serta komitmen dan dukungan dari seluruh ASN Dinas Ketahanan Pangan.

18. Ketepatan waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan setelah APBD ditetapkan). Perjanjian Kinerja telah disusun dan ditanda tangani oleh Pejabat terkait serta sudah di upload pada aplikasi SAKP Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Capaian Kinerja 100%.

19. Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit

Melaksanakan Percepatan Realisasi Anggaran berdasarkan SPD yang terbit setiap bulan.

Kinerja indikator persentase realisasi kegiatan fisik dan realisasi keuangan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2024 mempunyai target sebesar 100%, realisasi fisik sebesar 100% dengan capaian kinerja indikator persentase realisasi fisik, sedang realisasi



keuangan Dinas Ketahanan Pangan sebesar 89,57%. Faktor keberhasilan capaian kinerja indikator persentase realisasi kegiatan fisik dan realisasi keuangan oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah adanya komitmen dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan beserta seluruh jajarannya dalam merealisasikan capaian kinerja dari sub kegiatan, serta kerjasama antara PPTK, Pejabat Pembuat Komitmen.

20. Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Pada Perangkat daerah Per Tri Wulan

Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap Program dan Kegiatan perangkat daerah.

Kinerja Indikator Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Risiko oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 disusun setiap Tri wulan dan telah di Upload dalam Link yang disiapkan dengan Capaian Kinerja 100%.

21. Nilai Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah.

Melalui Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi ini, Kukar diharapkan dapat mencapai level 3 (tiga) dalam kematangan penyelenggaraan SPIP.

22. Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.

Sesuai hasil Pengumuman Arsip nasional Republik Indonesia No Ak.01.00/28/2024 tanggal 18 Desember 2024, Hasil pengawasan Kearsipan Tahun 2024 Untuk kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nilai A (Memuaskan). Sedangkan Untuk Pengawasan Internal Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Surat No. B-2/P3A-DIARPUS/000.5.15.1/12/2024 Tentang hasil pengawasan, Dinas Ketahanan Pangan mendapat Nilai 66,41 (Baik)

23. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada Tahun 2024, Hasil Kinerja Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan nilai sebesar 66,94 (B) mengalami sedikit Penurunan dibandingkan dengan Hasil Penilaian tahun sebelumnya sebesar 88,89.

24. Prestasi Inovasi Perangkat Daerah



Dinas Ketahanan Pangan telah membuat Inovasi. Melalui Inovasi PEJAKA PAS (Pelayanan Jaminian Keamanan Pangan Segar) diharapkan dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang sebelumnya dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Khususnya Bidang Keamanan Pangan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan yaitu keterjangkauan, kecepatan pengujian dan edukasi kepada masyarakat sehingga jaminan mutu keamanan pangan segar dapat tercapai. Untuk satu inovasi ini maka Dinas Ketahanan Pangan telah memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100 %

25. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor dengan realisasi Capaian 100% dari target yang ditetapkan 100%
26. Pengamanan Aset tanah
Dinas Ketahanan Pangan dalam Neracanya tidak memiliki aset tanah, sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam Pengamanan Aset Tanah.
27. Fakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana pada Perangkat Daerah. Terhadap aset yang dipakai oleh pejabat pada Dinas Ketahanan Pangan semua sudah menandatangani Pakta Integritas. Capaian Kinerja untuk Indikator ini 100% dari target yang ditetapkan 100%.
28. Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan
Pada Dinas Ketahanan Pangan Sudah terdapat program dalam Rangka Berpartisipasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Terdapat 2 Sub Kegiatan yang ikut Berperan dalam RBPK berupa program Pondok pangan Etam dan Babe Idaman.
29. Prevalensi stunting sesuai Dengan Target Nasional
Terlaksananya Koordinasi Konvergensi Penurunan Stunting Kabupaten.
Kinerja indikator penurunan prevalensi stunting oleh Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2024, mempunyai target sebesar 14, realisasi



sebesar 100%, dengan capaian kinerja indikator penurunan prevalensi stunting oleh Dinas Ketahanan Pangan sebesar 100%. Indikator kinerja penurunan prevalensi stunting merupakan jenis indikator yang bersifat minimize, artinya semakin rendah nilai realisasi dari indikator tersebut, maka semakin baik kinerja yang telah dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja indikator penurunan prevalensi stunting sebesar 100%, menunjukkan bahwa pencegahan terhadap stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan keberhasilan dari capaian kinerja indikator tersebut.

30. Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender

Dinas Ketahanan Pangan Sudah menyusun Penanggaran Pengarusutamaan Gender, dari target yang ditetapkan 100% Kinerja yang dicapai sebesar 100%.

31. Capaian Investasi Kabupaten Kutai kartanegara

Realisasi Investasi kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data yang ada samapi denagn TW III Tahun 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan, daro target 7,3 T tersealisasi sebesar 14, 8 T. Realisasi Investasi terbesar dari Sektor Pertambangan.

32. Angka Inflasi 1,5% - 3,5%

Angka Inflasi Kabupaten Kukar pada tahun 2024 sebesar 1,5 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan tercapai dengan Kinerja 100%.

33. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap Bulan. Tingkat Kepatuhan terhadap P3DN telah dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan pangan dengan membuat Laporan sesuai format dan mengikuti aplikasi yang ada.

34. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di daerah (Nilai LPPD).

Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3,1135 dengan kategori sedang dan berada pada peringkat 115

35. Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Insektorat sebesar 66,94 (dengan predikat B) sementara target yang ditetapkan sebesar 79,00 sehingga realisasinya capaian kinerja sebesar **84,73%** (Sumber Data *Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024*). Tidak tercapainya Target kinerja karena terdapat beberapa Indikator tambahan yang memang sulit untuk dipenuhi Oleh Perangkat Daerah.

36. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi tiap tiap komponen berbeda-beda Ada yang indeksnya sangat baik, ada beberapa yang masih terdapat catatan-catatan rekomendasi yang harus di tindaklanjuti Pemerintah daerah. Indeks Reformasi Birokrasi 65,62 dari target yang ditetapkan sebesar 73.

37. Indeks Inovasi Daerah

Sesuai dengan Keputusan menteri Dalam negeri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024 , tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2024 dengan Indeks Inovasi 58,59 (Inovatif) dari target yang ditetapkan sebesar 49,57.

38. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah tercapai sebesar 4,35 dari target yang ditetapkan sebesar 8,95.

39. Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan realisasi capaian predikat Zona Hijau, sesuai yang di targetkan Predikat Zona Hijau.

40. Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau. Mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Instansi Perkantoran Pemerintah Kinerja Indikator Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Perkantoran oleh Dinas Ketahanan Pangan



sebesar 100%. Faktor keberhasilan dari capaian kinerja indikator kawasan tanpa asap rokok (KTR) di perkantoran oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah adanya Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, serta dukungan dan komitmen dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

41. Meningkatnya Kepuasan masyarakat dengan Indeks kepuasan masyarakat 87,67 dari target yang ditetapkan sebesar 100%.
42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten kutai Kartanegara sesuai dengan hasil yang disampaikan oleh dinas Lingkungan Hidup Daerah dengan Nilai 73,59 termasuk dalam kategori baik.
43. Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dengan Urusan Pangan dengan Indikator Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan Indikatoe Ketersediaan Pangan Utama, Skore Pola Pangan harapan Ketersediaan, Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein dan skore Pola Pangan harapan Konsumsi, dengan rapat rata pencapaian Kinerja Sangat Tinggi
44. Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan pangan telah melakukan pemetaan kemampuan mengaji bagi ASN yang dituangkan dalam SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara No. B-1326/Disketapang-Set/800.1.14.1/12/2024 tentang Penetapan Tim Gerakan Etam mengaji (GEMA) Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara.
45. SK Pembentukan UPZ Perangkat daerah
Dinas Ketahanan Pangan telah membentuk Unit Pengumpul Zakat pada tahun 2024, sesuai dengan SK Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kutai Kartanegara No. 06/BAZNAS-KUKAR/II/2025 Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Dinas



Ketahanan pangan Kabupaten kutai Kartanegara Masa Bakti 2024 -
2027



3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Dua Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 96,28%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 102,58%. Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sebesar 100,38%. Jika Dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian Kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,3 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan dua tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja dua Tahun Sebelumnya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | Ket. |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Target Kinerja | Realsiasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Realsiasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | Target Kinerja | Realsiasi Kinerja | Persentase Realisasi Kinerja | |
| Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | Nilai | 77 | 74,28 | 96,47 | 78 | 88,89 | 113,96 | 79 | 66,94 | 84,73 | Menurun |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras) | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 129 | 118 | 91,47 | 130 | 118,46 | 91,12 | 134 | 102,95 | 76,83 | Menurun |
| | Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Skore | 96,48 | 93,66 | 97,08 | 97,89 | 92,83 | 94,83 | 98,59 | 94,12 | 95,67 | Meningkat |
| | Ketersediaan energi dan protein Perkapita | | | | | | | | | | | |
| | - Ketersediaan Energi | Kkal/Kap /Hari | 2372 | 2458 | 103,63 | 2378 | 2779 | 116,86 | 2387 | 2546 | 106,66 | Menurun |
| | - Ketersediaan Protein | Gram/ Kap/Hari | 79,42 | 115 | 144,80 | 79,81 | 104,4 | 130,81 | 80,20 | 84,77 | 105,70 | Menurun |
| Meningkatnya Skore Pola Pangan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | Skore | 82 | 84,5 | 103,05 | 84 | 88,46 | 105,31 | 86 | 93,80 | 109,07 | Meningkat |
| | | | | | 100,38 | | | 102,58 | | | 96,28 | Menurun |



3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

| Indikator Kinerja | Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2026) | Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024 | Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024 |
|---|---|--|---|
| Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | 81 | 66,94 | 82,64 |
| Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | 140 | 102,95 | 73,53 |
| Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | 100 | 94,12 | 94,12 |
| Ketersediaan energi dan protein Perkapita | | | |
| - Ketersediaan Energi | 2400 | 2546 | 106,08 |
| - Ketersediaan Protein | 80,97 | 84,77 | 104,69 |
| Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | 90 | 93,80 | 102,22 |
| | | | |

REALISASI KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DIBANDING REALISASI KINERJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL

| Indikator Kinerja | Realisasi Target Tahun 2024 Kutai Kartanegara | Realisasi Target Tahun 2024 Kalimantan Timur | Realisasi Target Tahun 2024 Nasional |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | 94,12 | 98,00 | 98,92 |
| Ketersediaan energi dan protein Perkapita | | | |
| - Ketersediaan Energi | 2546 | 2606 | 3494 |
| - Ketersediaan Protein | 84,77 | 115,29 | 78,89 |
| Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | 93,80 | 87,60 | 94,10 |
| | | | |



Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk beberapa Indikator bisa dibandingkan dengan Capain Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional sebagai berikut :

1. Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Score PPH) Ketersediaan
Jika Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Provinsi Kalimantan Timur maupun Tingkat Nasional, untuk score Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara masih termasuk Rendah, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan score 94,12 dan Provinsi Kalimantan Timur 98,00 Hampir sama dengan Tingkat Nasional sebesar 98,82
2. Ketersediaan Energi
Ketersediaan Energi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 2546 kkal/kap/hari. Kondisi ini masih lebih Rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja Provinsi Kalimantan Timur (2687 kkal/kap/hari), tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tingkat nasional (3493 kkal/kap/hari).
3. Ketersediaan Protein
Ketersediaan protein di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 84,77 gram/kapita/hari lebih rendah dibanding Capaian Kinerja Provinsi Kalimantan Timur sebesar 119,96 gram/kap/hari, namun masih lebih tinggi dari Capaian Kinerja Tingkat nasional sebesar 78,89.
4. Skore Pola Pangan Harapan Konsumsi (Score PPH) Konsumsi.
Score PPH Konsumsi Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 93,80 lebih tinggi Jika dibandingkan dengan Skore PPH Kalimantan Timur sebesar 87,60 namun bila dibandingkan dengan tingkat Nasional sedikit lebih Rendah. Skore PPH tingkat Nasional tahun 2024 sebesar 94,10.

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator kinerja Sasaran | Capaian Kinerja Sasaran | Program | Capaian Realisasi Anggaran Program | Efisiensi (%) | Ket |
|--|---|-------------------------|---|------------------------------------|---------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3-5) | (7) |
| Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | 84,73 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 84,92 | -0,19 | Tidak Efisien |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras) | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | 96,22 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 92,08 | 4,14 | Efisien |
| | Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | | | |
| | Ketersediaan energi dan protein Perkapita | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | | | |
| | - Ketersediaan Energi - Ketersediaan Protein | | | | | |
| Meningkatnya Skore Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | 109,07 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 94,47 | 14,60 | Efisien |
| | TOTAL | 96,67 | | 89,57 | 7,10 | Efisien |

Dari tabel tersebut diatas dapat diuraikan bahwa secara keseluruhan antara pencapaian indikator dengan penggunaan Sumber dana masih terdapat Efisiensi Sumberdana sebesar 7,10 Persen. Namun apabila dilihat dari masing2 Indikator terdapat satu capaian Indikator yang tidak Efisien sebesar 0,19 untuk Capaian Indikator Predikat akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Meskipun ada kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan tetapi tidak terjadi pemborosan anggaran, karena prosentase realisasi anggaran yang digunakan masih dibawah prosentase capaian kinerja. Dan untuk kegiatan yang Capaian Kinerjanya melebihi target maka dipastikan terjadi efisiensi penggunaan anggaran.



3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator kinerja Program tahun 2024 yaitu Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan target Kinerja 79 dan realisasinya 66,94 atau capaian kinerja sebesar 84,73%.

Target kinerja Tahun 2024 tidak dapat di capai karena adanya beberapa indikator baru yang memang sulit untuk dipenuhi oleh setiap Perangkat Daerah.

- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. Target Kinerja Program adalah Cakupan Sarana dan Prasarana Pendukung Kemandirian pangan sebanyak 11 Unit Berupa Pembangunan Lumbung Pangan sebanyak 3 Unit, dan Lantai Jemur 6 Unit dan Rice Milling Unit (RMU) sebanyak 2 Unit. Realisasi Kinerja Tahun 2024 tercapai sebanyak 11 Unit dengan capaian Kinerja 100%. Keberhasilan ini terutama karena adanya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 dalam Program ini ada dua indikator sebagai berikut :

- a) Kecukupan Konsumsi Energi dengan target 2200 kkal/Kap/hari dengan realisasi sebesar 2021 kkal/kap/hari dengan capaian 92,92%

Tidak tercapainya target yang ditetapkan untuk tahun 2024 karena konsumsi padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berlemak, kacang-kacangan, sayur dan buah masih rendah jika dibandingkan dengan anjuran pemerintah pada WNPG Tahun 2018. Masih perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Perlu



banyak melakukan sosialisasi dan Promosi terhadap Penganekaragaman konsumsi pangan

- b) Kecukupan Konsumsi Protein dengan target sebesar 57 dengan realisasi 61,30 atau capaian sebesar 65,10%.

Untuk Konsumsi protein di kabupaten Kutai Kartanegara sudah tercukupi, bahkan telah melebihi anjuran Pemerintah pada WNPG Tahun 2018 semua unsur sudah melebihi standar yang ditetapkan.

Pencapaian untuk Program ini didukung kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi pangan Sosialisai Konsumsi B2SA dan gerakan Minum susu di 400 Siswa di 7 Sekolah dasar tersebar di beberapa kecamatan, Bantuan Saprodi untuk 13 Kelompok Dasa Wisma, Pondok pangan Etam 3 Kelompok Masyarakat,

- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan. Pada tahun 2024 terdapat 21desa termasuk dalam kondisi rentan rawan Pangan Prioritas 2 dan 3. Pada saat penyusunan penetapan Indikator dan Target yang ditetapkan Pada tahun 2024 untuk Program Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan Prioritas I dengan target 21 Desa. Dalam Pelaksanaannya dalam rangka rangka pengendalian Dampak Inflasi melalui dana APBD Tahun 2024 Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di 21 Desa untuk prioritas 2 dan prioritas 3 yang tersebar di 8 Kecamatan berupa bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan. Melalui Dana Insentif Daerah pada APBD perubahan dilaksanakan pemberian bantuan Bantuan Bahan Pangan Pokok (Minyak, Gula, Susu, Kacang Hijau, bihun dll) di 21Desa Rentan Rawan Pangan prioritas 2dan 3 yang tersebar di 8 Kecamatan sesuai dengan Peta Kerentanan dan Kerawanan pangan (FSVA) yang ditetapkan dengan SK Bupati No. 15/SK-BUP/HK/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Lokasi desa Rentan Rawan Pangan.
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator dan target kinerja Tahun 2024 Cakupan Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan yang aman di konsumsi dengan target 95,00% dan tercapai 97,00% atau capaian program sebesar 102,11%. Hal ini karena adanya pembinaan yang dilakukan



terus menerus sehingga kesadaran masyarakat dalam penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi pangan segar dapat dikurangi. Pembinaan Keamanan Pangan telah dilakukan di 11 Kecamatan baik untuk Post Market maupun Pre Market.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program Penunjang | Target Kinerja Program | Realisasi Kinerja Program | Persentase Realisasi Kinerja Program | Analisis Keberhasilan / Kegagalan |
|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---|
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 79 | 66,94 | 84,73 | Terdapat Indikator Baru dalam penilaian yang belum bisa dipenuhi Perangkat Daerah. |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras) | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 11 Unit Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | 11 Unit Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | 100 | Adanya Dukungan anggaran baik dari Pemerintah Daerah |
| | Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 21 Desa | 21 Desa | 100 | Adanya Dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah |
| | Ketersediaan energi dan protein Perkapita - Ketersediaan Energi - Ketersediaan Protein | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 95,00% | 97,00% | 102.11 | Adanya Kesadaran Masyarakat Untuk memproduksi Bahan Pangan Segar yang aman untuk dikonsumsi |
| Meningkatnya Skore Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 23 Kelompok | 23 Kelompok | 100 | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi dan Aman |

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89,57 %, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|--|---|---|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 200.000.000 | 191.913.220 | 95,96 | 8.086.780 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.000.000 | 48.658.630 | 97,32 | 1.341.370 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 200.000.000 | 194.908.275 | 97,45 | 5.091.725 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.647.531.274 | 7.852.984.133 | 81,40 | 1.794.547.141 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 110.000.000 | 97.185.460 | 88,35 | 12.814.540 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 40.000.000 | 39.638.000 | 99,10 | 362.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 50.000.000 | 49.915.300 | 99,83 | 84.700 |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100.000.000 | 99.961.932 | 99,96 | 38.068 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 26.216.500 | 87,39 | 3.783.500 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 250.000.000 | 215.511.200 | 86,20 | 34.488.800 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.000.000 | 18.125.000 | 90,63 | 1.875.000 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000 | 249.535.108 | 99,81 | 464.892 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 75.000.000 | 74.887.003 | 99,85 | 112.997 |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 100.000.000 | 95.348.000 | 95,35 | 4.652.000 |
| | | Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | 170.000.000 | 166.965.000 | 98,21 | 3.035.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 33.502.000 | 24.583.892 | 73,38 | 8.918.108 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 29.815.000 | 99,38 | 185.000 | | |
| Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 498.524.188 | 497.767.281 | 99,85 | 756.907 | | |



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) | |
|--|---|--|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|---|
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | | Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 637.680.000 | 635.010.650 | 99,58 | 2.669.350 | |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras) | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | |
| | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 2.850.000.000 | 2.704.693.377 | 94,90 | 145.306.623 | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik | 150.000.000 | 146.107.989 | 97,41 | 3.892.011 | |
| | | Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 3.250.000.000 | 3.052.463.669 | 93,92 | 197.536.331 | |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | |
| | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | |
| | | Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 100.000.000 | 95.546.648 | 95,55 | 4.453.352 | |
| | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | |
| | | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3.800.000.000 | 3.338.487.330 | 87,85 | 461.512.670 | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 90.466.015 | 90,47 | 9.533.985 | |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | #DIV/0! | - |
| | | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.967.878 | 99,94 | 32.122 | |
| | | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000 | 74.840.000 | 99,79 | 160.000 | |
| Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | 75.000.000 | 71.960.000 | 95,95 | 3.040.000 | | | |
| Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 49.975.000 | 99,95 | 25.000 | | | |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | 50.000.000 | 44.866.000 | 89,73 | 5.134.000 | | | |



| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | |
| | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | |
| | | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 2.652.820.000 | 2.492.302.850 | 93,95 | 160.517.150 |
| | | Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan | 250.000.000 | 248.873.600 | 99,55 | 1.126.400 |
| | | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen | 150.000.000 | 147.722.880 | 98,48 | 2.277.120 |
| | | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | 75.000.000 | 74.614.876 | 99,49 | 385.124 |
| | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota | 1.801.973.136 | 1.791.039.814 | 99,39 | 10.933.322 |
| | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | |
| | | Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan | 100.000.000 | 99.636.570 | 99,64 | 363.430 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 1.200.000.000 | 1.026.982.524 | 85,58 | 173.017.476 |
| | | Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 125.000.000 | 122.217.900 | 97,77 | 2.782.100 |
| JUMLAH | | | 29.397.030.598 | 26.331.694.504 | 89,57 | 3.065.336.094 |



Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 93,58 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2023)

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Prosentase | Sisa Anggaran |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | (Rp) | (Rp) | Realisasi (%) | (Rp) |
| Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 200.000.000 | 197.811.554 | 98,91 | 2.188.446 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.000.000 | 49.373.560 | 98,75 | 626.440 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100.000.000 | 99.980.400 | 99,98 | 19.600 |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.266.664.103 | 5.990.537.630 | 95,59 | 276.126.473 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 80.000.000 | 77.850.000 | 97,31 | 2.150.000 |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 40.000.000 | 31.930.000 | 79,83 | 8.070.000 |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| | | Pengadaan pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya | 124.515.000 | 121.167.000 | 97,31 | 3.348.000 |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 55.000.000 | 54.320.000 | 98,76 | 680.000 |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 350.000.000 | 292.642.000 | 83,61 | 57.358.000 |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 | - |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 320.000.000 | 319.963.991 | 99,99 | 36.009 |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 75.000.000 | 73.597.470 | 98,13 | 1.402.530 |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 150.000.000 | 146.975.500 | 97,98 | 3.024.500 |
| | | Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 785.000.000 | 739.330.000 | 94,18 | 45.670.000 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | 1.150.000.000 | 730.790.000 | 63,55 | 419.210.000 |
| | | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | 1.524.000.000 | 1.432.490.000 | 94,00 | 91.510.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30.000.000 | 23.969.750 | 79,90 | 6.030.250 | | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 | - | | |
| Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran | 514.048.760 | 495.828.687 | 96,46 | 18.220.073 | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mobil Operasional | 282.365.000 | 270.986.800 | 95,97 | 11.378.200 | | |
| Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 287.680.000 | 267.988.140 | 93,15 | 19.691.860 | | |



| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Prosentase | Sisa Anggaran |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | (Rp) | (Rp) | Realisasi (%) | (Rp) |
| Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama (beras) | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | | | | |
| | | Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan | 1.550.000.000 | 1.522.939.755 | 98,25 | 27.060.245 |
| | | Penyediaan Infrastruktur Lanai Jemur | 1.100.000.000 | 1.085.597.070 | 98,69 | 14.402.930 |
| | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | 500.000.000 | 487.986.500 | 97,60 | 12.013.500 |
| | | Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan | 50.000.000 | 46.189.960 | 92,38 | 3.810.040 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | - |
| | | Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 100.000.000 | 98.227.724 | 98,23 | 1.772.276 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota | 100.000.000 | 84.509.000 | 84,51 | 15.491.000 |
| | | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.500.000.000 | 1.423.768.112 | 94,92 | 76.231.888 |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | - |
| | | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 48.662.000 | 97,32 | 1.338.000 |
| | | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 48.644.999 | 97,29 | 1.355.001 |
| | | Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | 75.000.000 | 71.620.000 | 95,49 | 3.380.000 |
| | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 47.750.000 | 95,50 | 2.250.000 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota | 75.000.000 | 70.297.160 | 93,73 | 4.702.840 | | |



| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Prosentase Realisasi (%) | Sisa Anggaran (Rp) |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | (Rp) | (Rp) | | |
| Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | |
| | | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 75.000.000 | 74.940.618 | 99,92 | 59.382 |
| | | Pemantuan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 100.000.000 | 99.996.750 | 100,00 | 3.250 |
| | | Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan | 100.000.000 | 99.440.825 | 99,44 | 559.175 |
| | | Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota | 400.000.000 | 396.199.000 | 99,05 | 3.801.000 |
| | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota | 3.700.000.000 | 3.448.274.241 | 93,20 | 251.725.759 |
| | | Penyusunan dan Penetapan target Konsumsi Pangan | 150.000.000 | 145.948.899 | 97,30 | 4.051.101 |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 4.050.000.000 | 3.755.481.773 | 92,73 | 294.518.227 |
| | | Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 75.000.000 | 73.057.700 | 97,41 | 1.942.300 |
| JUMLAH | | | 26.269.272.863 | 24.582.064.568 | 93,58 | 1.685.019.849 |

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi Kenaikan realisasi anggaran sebesar 4,01%.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026.

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara Tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat Tinggi dengan capaian rata rata sebesar 101,41%.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Sebagai Berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|--|---|----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1. | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan (Nilai SAKIP) | Nilai | 79 | 66,94 | 84,73 | Tinggi |
| 2. | Meningkatkan Ketersediaan Pangan Daerah | Persentase Ketersediaan pangan utama (Beras/ Jagung sesuai kebutuhan) | Persen | 134 | 102,95 | 76,83 | Tinggi |
| | | Skore Pola Pangan Harapan Ketersediaan | Persen | 98,59 | 94,12 | 95,67 | Tinggi |
| | | Ketersediaan energi dan protein Perkapita | | | | | |
| | | - Ketersediaan Energi | Kkal/Kap /Hari | 2387 | 2546 | 106,66 | Sangat Tinggi |
| | | - Ketersediaan Protein | Gram/ Kap/Hari | 80,20 | 84,77 | 105,70 | Sangat tinggi |
| 3. | Meningkatnya Skore Pola Pangan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skor PPH Konsumsi) | Skore | 86 | 93,80 | 109,07 | Sangat Tinggi |
| 4 | Mewujudkan tingkat | Tingkat Kepatuhan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|--|--|--------|--------|-----------|-----------------|--------------------|
| | kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | | | | | tinggi |
| | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100 Persen per tanggal 31 Maret Setia tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 5 | Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir Nulan Pebruari Setiap Tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Pebruari setiap Tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Input E Pantau | Tingkat Ketepatan waktu Input E Pantau dan telah di Verifikasi 100% per tanggal 10 Setiap Bulan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 8 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 9 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Usulan Standar harga Satuan (SHS) Perangkat daerah Paling Lambat Bulan April Untuk Tahun Anggaran Berikutnya | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Intstansi Pemerintahan (LKJIP) Perangkat Daerah Paling Lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-----------------|--------------------|
| 11 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan januari setiap tahun. | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 12 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak lanjut Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir Bulan Juni dan semester II akhir Bulan Oktober setiap tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 14 | Meningkatnya keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 15 | Menyelesaikan Tindak Lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas Audit LKPD 5 tahun terakhir | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 16 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah Per 30 Juni Tahun Berikutnya | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 17 | Penerapan Core Value Berakhlak | Internalisasi Core Value Berakhlak | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 18 | Penyusunan Perjanjian Kinerja Sampai Ke Pelaksana | Ketepatan waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|--|---|--------|--------|-----------|-----------------|--------------------|
| 19 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 20 | Ketersediaan Dokumen manajemen Resiko Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen Manajemen Resiko Pada Perangkat daerah Per Tri Wulan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 21 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP Pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 22 | Melaksanakan tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 23 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 24 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 25 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 26 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset tanah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 27 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | Fakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksanan pada Perangkat Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 28 | Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan Pada Perangkat Daerah | Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan | Jumlah | 1 | 1 | 100 | Sangat tinggi |
| 29 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi stunting sesuai Dengan Target Nasional | Persen | 14 | 14 | 100 | Sangat tinggi |
| 30 | Pengaruh Utama Gender | Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 31 | Peningkatan Investasi | Capaian Investasi Kabupaten Kutai kartanegara | Rupiah | 7,3 T | 14,8 T | 200 | Sangat tinggi |
| 32 | Pengendalian Inflasi | Angka Inflasi 1,5% - 3,5% | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Kriteria Penilaian |
|----|---|--|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------------|
| 33 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap Bulan | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 34 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 | 3,1135 | 86,49 | Tinggi |
| 35 | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 73 | 65,92 | 90,30 | Sangat Tinggi |
| 36 | Meningkat manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah daerah | Nilai | 64 | 60,12 | 93,94 | Sangat Tinggi |
| 37 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 | 58,59 | 118,20 | Sangat Tinggi |
| 38 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 | | | |
| 39 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona Hijau | Zona Hijau | 100 | Sangat Tinggi |
| 40 | Terlaksana Kawasan tanpa Rokok/Vape | Kawasan Tanpa Rokok/ Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 41 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM Perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 42 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 43 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Indikator Kinerja Perangkat daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 44 | Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah | Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah | Laporan | 1 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| 45 | Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat daerah | SK Pembentukan UPZ Perangkat daerah | Surat Keputusan | 1 | 100 | 100 | Sangat tinggi |
| | | Total Capaian Rata-Rata | | | | 4867,59 101,41 | Sangat Tinggi |



Capaian kinerja tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,17% dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara sebesar 102,58% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 1,17%

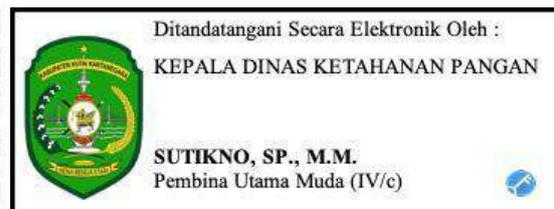
4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Internal terhadap kinerja Dinas Ketahanan Pangan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan semua kegiatan agar sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun.
- 2) Meningkatkan Pembinaan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dan tidak hanya bertumpu kepada beras sebagai sumber energi.
- 3) Meningkatkan upaya kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat dan daerah, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 21 Februari 2025





LAMPIRAN LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTIKNO, SP.,MM

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- 3 Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
- 4 Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
- 5 Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan
- 6 Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;

- 7 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 8 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 9 Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
- 10 Melaksanakan Manajemen Resiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- 11 Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
- 12 Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
- 13 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 14 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 15 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
- 16 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 17 Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 18 Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
- 19 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 20 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

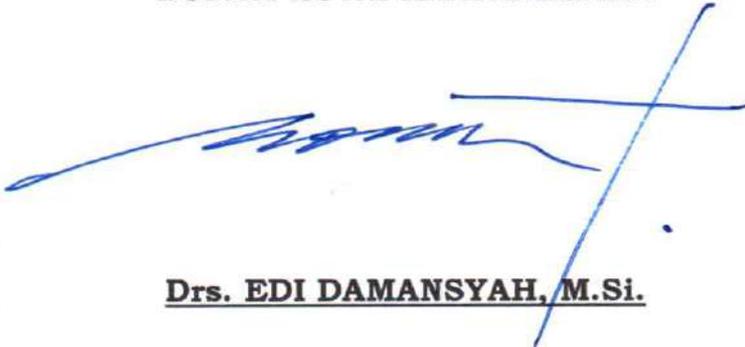
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

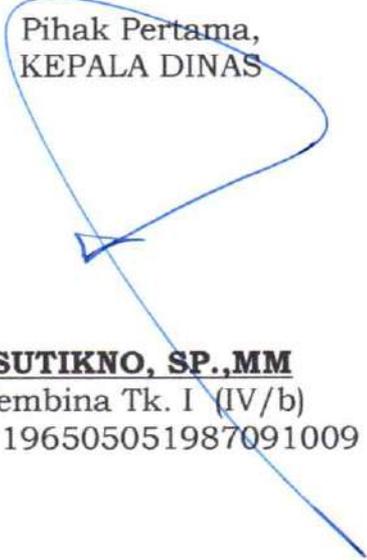
Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.



SUTIKNO, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196505051987091009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|-----------|--|--|------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 79 |
| 2 | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah | Ketersediaan Energi | Kkal/kapita/hari | 2,387 |
| | | Ketersediaan Protein | Gram/kapita/hari | 80,20 |
| 3 | Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (Skore PPH) Konsumsi. | Skor | 86 |
| 4 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 |
| | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 |
| 5 | Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun | Persen | 100 |

| | | | | |
|----|---|--|--------|-----|
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau | Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan | Persen | 100 |
| 8 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 |
| 9 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya | Persen | 100 |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 |
| 11 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD | Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun | Persen | 100 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|-----|
| 12 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 |
| 13 | Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun | Persen | 100 |
| 14 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 |
| 15 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir: | Persen | 100 |
| 16 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan | Persen | 100 |
| 17 | Penerapan Core Values ASN Berakhlak | Internalisasi Core Values ASN Berakhlak | Persen | 100 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|-----|
| 18 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 |
| 19 | Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 70 |
| 20 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD | Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan | Persen | 100 |
| 21 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 22 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 23 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 24 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 25 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan | Persen | 100 |
| 26 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset Tanah | Persen | 75 |
| 27 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah | Persen | 100 |

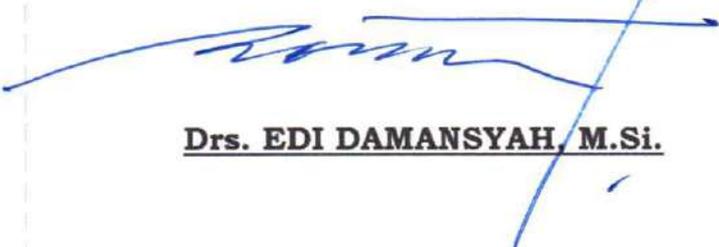
| | | | | |
|----|--|---|----------|------------|
| 28 | Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah | Jumlah program pengentasan kemiskinan | Jumlah | 1 |
| 29 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional | Persen | 14 |
| 30 | Pengarusutamaan Gender | Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender | Persen | 100 |
| 31 | Peningkatan Investasi | Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara | Rupiah | 7,3 T |
| 32 | Pengendalian Inflasi | Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5% | Persen | 100 |
| 33 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan | Persen | 40 |
| 34 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 |
| 35 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai | 73 |
| 36 | Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Nilai | 64 |
| 37 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 |
| 38 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah | Nilai | 8,95 |
| 39 | Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona Hijau |

| | | | | |
|----|--|---|--------|-----|
| 40 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape | Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 |
| 41 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 100 |
| 42 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 |
| 43 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 |

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

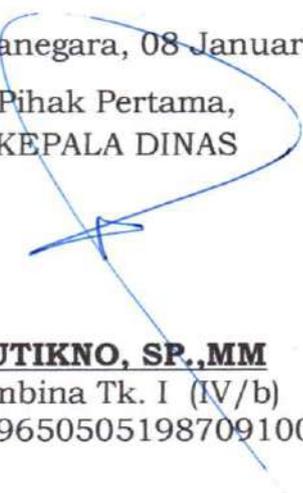
| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 2.000.000.000 | APBD |
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 300.000.000 | APBD |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | 6.250.000.000 | APBD |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 3.600.000.000 | APBD |
| 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 10.771.410.373 | APBD |
| JUMLAH ANGGARAN | | 22.921.410.373 | |

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Kutai Kartanegara, 08 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


SUTIKNO, SP.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196505051987091009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTIKNO, SP., MM.

Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel;
5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan;

6. Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil kepuasan masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
10. Melaksanakan Manajemen Risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
17. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

19. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

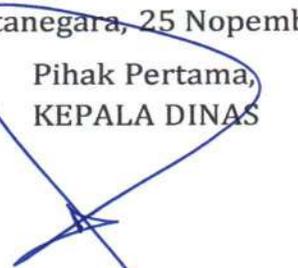
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS


SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505051987091003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET |
|------------|--|--|------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 79,00 |
| 2 | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Daerah | Ketersediaan energi | Kkal/Kapita/Hari | 2.387 |
| | | Ketersediaan Protein | Gram/Kapita/Hari | 80,20 |
| 3 | Meningkatnya Score Pola Pangan Harapan | Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (score PPH) Konsumsi | Skor | 86 |
| 4 | Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara | Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 |
| | | Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 Maret setiap tahun | Persen | 100 |
| 5 | Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | Tingkat kepatuhan penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun | Persen | 100 |
| 6 | Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP | Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per akhir Februari setiap tahun | Persen | 100 |

| | | | | |
|----|---|--|--------|-----|
| 7 | Terlaksananya Kepatuhan Input E-Pantau | Tingkat ketepatan waktu input e-pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan | Persen | 100 |
| 8 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan | Persen | 100 |
| 9 | Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan) | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya | Persen | 100 |
| 10 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Pebruari setiap tahun | Persen | 100 |
| 11 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun | Persen | 100 |
| 12 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD | Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun | Persen | 100 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|-----|
| 13 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah | Tingkat ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I Paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun | Persen | 100 |
| 14 | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik | Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) | Persen | 100 |
| 15 | Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) | Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas Audit LKPD 5 tahun terakhir | Persen | 100 |
| 16 | Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan | Persen | 100 |
| 17 | Penerapan Core Values ASN Berakhlak | Internalisasi Core Values ASN Berakhlak | Persen | 100 |
| 18 | Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana | Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) | Persen | 100 |

| | | | | |
|----|---|---|--------|-----|
| 19 | Terlaksananya Sarapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan | Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit | Persen | 100 |
| 20 | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat daerah per Triwulan | Persen | 100 |
| 21 | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 22 | Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah | Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 23 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 24 | Peningkatan Prestasi Inovasi | Prestasi Inovasi Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 25 | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan | Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Laporan | Persen | 100 |
| 26 | Meningkatnya Pengamanan Aset | Pengamanan Aset Tanah | Persen | 100 |
| 27 | Meningkatnya Tata Kelola Aset | Fakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia Sesuai dengan jumlah Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksanaan pada Perangkat Daerah | Persen | 100 |

| | | | | |
|----|--|---|--------|-------|
| 28 | Terlaksananya Program Pengentasan Kemiskinan Pada Perangkat Daerah | Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan | Jumlah | 1 |
| 29 | Menurunnya Prevalensi Stunting | Prevelensi Stunting sesuai dengan target Nasional | Persen | 14 |
| 30 | Pengarusutamaan Gender | Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender | Persen | 100 |
| 31 | Peningkatan Investasi | Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegaea | Rupiah | 7,3 T |
| 32 | Pengendalian Inflansi | Angka Inflansi maksimal 1,5% - 3,5% | Persen | 100 |
| 33 | Kepatuhan Pelaporan P3DN | Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per Tanggal 25 Setiap bulan | Persen | 100 |
| 34 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai LPPD | Nilai | 3,6 |
| 35 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | Nilai | 73 |
| 36 | Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani | Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Nilai | 64 |
| 37 | Meningkatnya Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah | Nilai | 49,57 |

| | | | | |
|----|---|---|-----------------|------------|
| 38 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Pelayanan Publik Daerah | Nilai | 8,95 |
| 39 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah | Predikat | Zona Hijau |
| 40 | Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape | Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau | Persen | 100 |
| 41 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat | IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar) | Persen | 100 |
| 42 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 100 |
| 43 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100 |
| 44 | Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di Perangkat Daerah | Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah | Laporan | 1 |
| 45 | Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah | SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah | Surat Keputusan | 1 |

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 4.000.000.000 | APBD-P |
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 300.000.000 | APBD-P |
| 3 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | 6.250.000.000 | APBD-P |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 6.354.793.136 | APBD-P |
| 5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | 12.492.237.462 | APBD-P |
| JUMLAH ANGGARAN | | 29.397.030.598 | |

Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

SUTIKNO, SP., MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505051987091003